

**NEGARA DAN PETANI (STUDI KASUS PEMIHAKAN PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TERHADAP PETANI KELAPA)**

Kiki Satria

Email : kikisatriab2st@gmail.com

Pembimbing : Dr. Hasanuddin M,Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau
Kampus Bina Widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study used a qualitative descriptive method. Location Research in Indragiri Hilir the focus of research in the Department of Plantation Indragiri Hilir.

Plantation sector is one of the backbone of the economy Indragiri Hilir. Various plantation crops that have been developed over the years is the local coconut, hybrid coconut, oil palm, rubber, coffee, chocolate and nut. Of various commodities, the local oil is excellent. Plantation yield potential in the downstream Indragiri oil production reached 390,924.28 tons per year with a land area of 295,380.24 hectares. With this potential makes Indragiri Hilir listed as one of the world's largest oil region, even dubbed as the "**Land of Coconut Overlay World**". Potential land for plantation commodity development is an area of 722 806 ha. And has been used about 600 691 ha. As State palm plantation owners largest in the world, Indonesia has a plantation area of 3,7juta acres scattered palm islands. Kateman or more regions known as blunt River is the District which has the most extensive coconut plantations there. The gardens are owned by PT. Pulau Sambu, an agribusiness company that has a garden at the same time in the palm oil mill Indragiri Hilir.

Though coconut plantations (copra) in Inhil well managed by the planters, but the marketing of palm fluctuate so that the bargaining position of farmers is very low in determining the price, because they depend on the purchase by the company. This is because far too Regency Inhil give freedom to companies engaged in the coconut to make your own garden, for the supply of industrial raw materials. So when the company has been able to 'self' with their crops as a raw material, they will suppress the purchase price of coconut farmers. As a result of this monopoly in the market price of oil becomes unstable, even often substandard. This is due to lack of impartiality Government Indragiri Hilir so that the lives of farmers in Indragiri Hilir was not improved.

PENDAHULUAN

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang memiliki sumber daya alam perkebunan yang berlimpah terutama perkebunan kelapa (kopra), Kabupaten ini terbentuk setelah dirasa persyaratan administrasinya terpenuhi dan masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom). Setelah melalui penelitian, baik oleh Gubernur maupun Departemen Dalam Negeri, maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Propinsi Riau) tanggal 27 April 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965. Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur Pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 983.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki "Negeri Seribu Parit" yang sekarang terkenal dengan julukan "**NEGERI SERIBU JEMBATAN**" dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis

Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

- 0 36' Lintang Utara
- 1 07' Lintang Selatan
- 104 10' Bujur Timur
- 102 30' Bujur Timur

Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Pelalawan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kab. Tanjung Jabung Prop. Jambi.
- Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
- Sebelah Timur berbatas dengan Propinsi Kepulauan Riau.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah sentra penghasil kelapa di Indonesia, serta berpotensi menjadi hamparan kebun kelapa terluas di dunia. Di Kabupaten Indragiri Hilir pohon-pohon kelapa tumbuh dengan suburnya dari lahan-lahan yang semula hutan rawa-rawa gambut. Kontribusi perkebunan kelapa dari INHIL menjadikan Indonesia secara keseluruhan sebagai sentra perkebunan kelapa terbesar di dunia. Sebagai negara pemilik kebun kelapa terluas di dunia, Indonesia mempunyai perkebunan seluas 3,7 juta hektar yang tersebar di kepulauan kelapa. Provinsi Riau memiliki areal perkebunan kelapa yang cukup luas, kurang lebih 579.399 hektar, sekitar 80 % berada di kabupaten Indragiri Hilir.

Perkebunan kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir secara umum merupakan kelapa rakyat seluas 384.095 hektar dengan produksi sebanyak 294.148 ton

kopra/tahun dan melibatkan sebanyak 78.512 kepala keluarga petani. Sedangkan perkebunan kelapa skala perusahaan yang merupakan perkebunan swasta nasional (PT. Pulau Sambu Group) seluas 73.758 hektar dengan produksi 124.805 ton kopra/tahun (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013).

Komoditas kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir masih dapat dikembangkan mengingat lahan yang tersedia untuk pengembangan masih cukup luas yaitu mencapai 210.283 hektar (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir) dan secara umum sektor kelapa merupakan mata pencaharian utama masyarakat daerah ini. Walaupun perkebunan kelapa (kopra) di Inhil dikelola dengan baik oleh para pekebun, namun pemasaran hasil perkebunan kelapa mengalami naik turun sehingga posisi tawar para petani sangat rendah dalam menentukan harga, karena mereka tergantung dengan pembelian oleh pihak swasta (PT Pulau Sambu Group). Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum mengeluarkan regulasi khusus tentang perkebunan kelapa di Inhil serta terlalu memberikan kebebasan kepada perusahaan yang bergerak di bidang perkelapaan untuk membuat kebun sendiri bagi pasokan bahan baku industrinya. Sehingga ketika pihak perusahaan telah mampu 'mandiri' dengan hasil kebun mereka sebagai bahan baku industrinya, mereka akan menekan harga pembelian kelapa petani.

Belum adanya fasilitas pasar yang memadai mengakibatkan harga kelapa menjadi tidak terkendali. Monopoli pasar kelapa yang

dilakukan oleh PT. Sambu membuat para petani kopra sangat tertekan dan mendesak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk segera membuat sebuah kebijakan yang berpihak terhadap nasib petani, langkah ini guna penyelamatan nasib para petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu pihak Pemerintah Kabupaten dan DPRD Indragiri Hilir juga diminta membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang perkelapaan di Inhil, terutama terkait mekanisme tata niaga dan harga kelapa. Belum adanya BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) menjadi salah satu masalah dalam memasarkan produk kelapa petani. Sebenarnya melalui peran Pemerintah terutama dengan pembentukan BUMD dapat memutuskan mata rantai monopoli yang dilakukan oleh pihak PT Pulau Sambu Group, sehingga pemerintah bisa menentukan harga kelapa yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan, dan juga hal ini dapat mempermudah masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir untuk menjual hasil panen kelapanya tentunya dengan harga yang sesuai standar yang telah ditentukan.

Selain itu, lemahnya keberpihakan pemerintah terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran distribusi hasil pertanian turut mendorong rendahnya nilai jual produk perkebunan kelapa petani di Kabupaten Indragiri Hilir. Seharusnya dengan penyediaan sarana jalan yang baik, pelabuhan yang baik akan turut serta meningkatkan daya saing produk kelapa petani. Akan tetapi, kenyataan dari beberapa tahun terakhir nilai jual produk kelapa petani di Kabupaten Indragiri Hilir semakin rendah, pada bulan Maret tahun 2013 tercatat

bahwa nilai jual kelapa berada pada posisi terendah sebesar Rp. 450,-/kilo. Kondisi itu tentu saja membuat para petani kelapa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain masalah di atas, belum adanya asosiasi berupa koperasi maupun kelompok tani membuat petani kelapa tidak dapat mengetahui perkembangan pasar. Alternatif lain dari penjualan hasil perkebunan kelapa adalah mendistribusikan hasil perkebunan kelapa ke pasar-pasar tradisional dan pasar daerah lain tapi bukan untuk industri. Oleh sebab itu, perlunya pemihakan pemerintah pada dasarnya adalah untuk melindungi hasil perkebunan kelapa milik masyarakat. Pemihakan itu dapat berupa perbaikan infrastruktur, regulasi, maupun fasilitasi dalam bentuk lainnya sehingga petani kelapa tidak tergerus oleh monopoli perusahaan maupun pedagang (baca-tauke kelapa).

Berdasarkan uraian itu, penulis memperhatikan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengelola perkelapaan sangat mendesak, selain itu besarnya potensi kelapa sebagai salah satu sumber pendapatan daerah juga sangat besar.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas pada tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pemihakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap petani kelapa?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemihakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap petani kelapa?

METODE

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan kualitatif,

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan dan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, adapun data tersebut menyangkut tentang permasalahan kriteria tentang permasalahan Negara dan Petani (studi kasus pemihakan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap petani kelapa) yang diteliti.

b. Data Sekunder

Untuk data skunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk jadi, ini sebagian besar sudah dilakukan di dalam menunjang informasi dalam penulisan proposal skripsi atau tesis yang lalu. Data skunder ini antara lain didapatkan pada Dinas Perkebunan, Internet, Buku, Media masa,

2. Informan

No	NAMA	KETERANGAN
1.	Mukhtar.T	Kepala Dinas Perkebunan
2.	Annas	Pegawai Dinas Perkebunan
3.	Tarmizi	Anggota DPRD
4.	H.Suparlan	Anggota DPRD
5.	Sudirman	Anggota DPRD
6.	Hamid,Aris	Petani
7.	Agus	Karyawan PT.Sambu
8.	Peri F	Pengamat Kebijakan
9.	H.Marjani	Tokoh Masyarakat

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2013

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data.

b. Dokumentasi

Yaitu penelitian melakukan penelitian pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Telaah kepustakaan dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan konsep dan teori yang berkaitan secara langsung.

c. Observasi

Pengamatan yang langsung dilakukan oleh penulis dengan melihat dari dekat gejala-gejala yang ada dilokasi penelitian yang merupakan objek penelitian penulis.

4. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan analisa kualitatif, jenis penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam pembahasan ini akan dibagi ke dalam dua pokok bahasan utama, *pertama* bahasan mengenai “pemihakan pemerintah terhadap petani kelapa”, dan bahasan *kedua* mengenai “faktor-faktor yang mempengaruhi pemihakan pemerintah terhadap petani kelapa” di Kabupaten Indragiri Hilir.

A. Pemihakan Pemerintah Terhadap Petani Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir

Melaksanakan tugas pembangunan sangat penting dan merupakan tanggung jawab seluruh komponen

masyarakat dan bukan pemerintah semata-mata. Meskipun demikian harus diakui bahwa Pemerintah mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan. Adapun peran pemerintah dalam proses pembangunan dapat berupa suatu pemihakan. Selanjutnya akan diuraikan pemihakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat menunjang kehidupan masyarakatnya.

1. Pemihakan Pemerintah Sebagai Stabilisator

Pemihakan pemerintah sebagai stabilisator dimaksud sebagai pemihakan dalam menjaga stabilitas harga, stabilitas sarana dan stabilitas distribusi.

2. Pemihakan Pemerintah Sebagai Inovator

Pemerintah dalam pembangunan memiliki peran salah satunya selaku inovator. Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting adalah cara berpikir baru. Dengan demikian selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru tersebut (teman, metode, sistem, cara berpikir).

Prakondisi yang harus terpenuhi agar peran pemerintah sebagai inovator dapat berjalan secara efektif antara lain:

1. Pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi

2. Menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan terlebih dahulu

3. Inovasi yang sifatnya kendeptional

4. Inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

Kemampuan sebagai Inovator Pembangunan adalah kemampuan menterjemahkan program pembangunan daerah dengan bahasan yang sederhana serta menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang pembangunan.

Dalam hal ini masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir mengharapkan adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan kualitas produksi kelapa baik secara produksi maupun pemasaran/harga jual. Dengan demikian masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir berharap pemerintah dapat membuat suatu program atau kebijakan yang dapat menunjang kehidupan petani di Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir selama ini yaitu belum adanya kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang perkembangan perkebunan kelapa tersebut, sehingga jaminan kesejahteraan kehidupan para petani dan perkembangan perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir belum dapat dipastikan. Sementara potensi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir sangat kuat apabila dijadikan sektor utama untuk menunjang perekonomian dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan demikian masyarakat Indragiri Hilir sangat mengharapkan pemerintah tersebut dapat berinovasi dalam hal pengelolaan maupun harga jual kelapa tersebut, sehingga taraf hidup masyarakat di Indragiri Hilir pun dapat meningkat.

Untuk mengembangkan inovasi pemerintah, menurut Mendagri setidaknya harus didukung oleh tiga hal. Pertama kualitas sumber daya

manusia yang mendorong kinerja aparat birokrasi daerah yang memiliki kompetensi dan integritas yang memadai. Kedua pengembangan program-program inovatif yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan yang lebih berkualitas, peningkatan pemberdayaan dan peningkatan daya saing daerah. Ketiga dukungan sumber anggaran yang memadai dan dikelola sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Dalam upaya pengembangan inovasi pemerintahan khususnya disektor perkebunan kelapa, setidaknya terdapat tiga indikator yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Ketiga indikator tersebut merupakan wujud aplikasi dari inovasi pemerintah, adapun ketiga indikator itu ialah indikator program inovatif, indikator sumber daya aparat dan indikator anggaran.

3. Pemihakan Pemerintah Sebagai Modernisator

Dalam peranan selaku modernisator, seorang aparat negara (birokrat) diharapkan memiliki pola pemikiran yang maju dan tidak selalu berpatokan kepada pandangan lama. Seorang aparat negara (birokrat) harus mampu mengubah pola pemikiran lama menjadi pola pemikiran modern untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Peranan selaku modernisator selalu berpatokan atau terarah pada pola pikir yang rasional, luas dan berketepatan waktu yang keseluruhannya ditujukan untuk mencapai tujuan.

Dalam perencanaan pembangunan nasional jangka pendek maupun jangka panjang di Indonesia, birokrat selaku modernisator harus dapat membuat perencanaan pembangunan

nasional di berbagai bidang yang sesuai dengan kondisi, budaya dan perekonomian rakyat. Perencanaan pembangunan nasional tersebut harus terarah, rasional, luas dan berketepatan waktu yang keseluruhannya ditujukan untuk mencapai tujuan bangsa dan negara Indonesia.

Demikian halnya dalam pengembangan sektor perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah seharusnya menjadi modernisator dalam upaya hilirisasi produk perkebunan kelapa masyarakat. Dengan adanya kegiatan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentunya petani memiliki alternatif penjualan produk hasil perkebunan kelapa. Namun yang terjadi justru sebaliknya, hilirisasi hanya dilakukan oleh swasta (PT. Pulau Sambu Group), kebutuhan hilirisasi produk oleh PT. Sambu tidaklah banyak, namun hasil perkebunan melimpah dan masyarakat tidak memiliki alternatif menjual selain ke PT. Sambu. Masalah mendasar dalam pemasaran produk perkebunan kelapa masyarakat adalah masalah distribusi dan pangsa pasar. Buruknya kualitas infrastruktur menjadi kendala utama dalam mendistribusikan hasil perkebunan, dampaknya tentu saja hasil produksi perkebunan tidak dapat dijual selain pada pengepul dan masyarakat sekitar yang membutuhkan kelapa sebagai bahan baku usaha.

Peran pemerintah selaku modernisator semestinya mampu memberikan rasa percaya diri kepada masyarakat dalam upaya peningkatan produk hasil perkebunan. Peningkatan produksi bukan hanya dalam penyediaan hasil, namun olahan dari hasil perkebunan menjadi

yang paling mendesak diperlukan oleh masyarakat yang selama ini mengolah hasil perkebunan kelapa dengan cara konvensional untuk dijadikan minyak kelapa dan kerajinan tangan tetapi sifatnya terbatas. Untuk melihat pemihakan pemerintah selaku modernisator, berikut indikator yang dapat dijadikan alat ukur upaya atau pemihakan tersebut. Adapun indikator modernisator tersebut adalah modernisator peralatan pertanian, modernisator manajemen dan modernisator kelembagaan.

4. Pemihakan Pemerintah Sebagai Pelopor

Komitmen harus diawali dari pemimpin ataupun pejabat pemerintah, baru kemudian dapat dibangun pada pegawai/bawahan. Pejabat harus menunjukkan komitmennya didepan pegawainya dan harus mampu memberikan suri teladan untuk dicontoh oleh pegawainya. Ketika seorang pejabat tidak memiliki komitmen yang tinggi untuk memelopori bawahannya secara jujur, efektif, efisien dan sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan mengakibatkan pegawainya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dan melakukan penyimpangan dalam mengelola keuangan negara.

Pemerintah harus memainkan peranan selaku pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Dengan kata lain bahwa selaku pelopor, aparatur pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. Kepeloporan yang dapat diberikan pemerintah misalnya kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya

dengan orientasi hasil yang semaksimal mungkin, kepeloporan dalam penegakan disiplin, kepeloporan dalam ketaatan kepada peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

Pemerintah harus mampu memelopori pembangunan dan harus didukung oleh masyarakatnya. Pemerintah harus mampu meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat, pemerintah harus mampu menggerakkan masyarakatnya agar sadar lingkungan, mampu mengembangkan usaha masyarakatnya dan mengembangkan keuangan daerah. Sebagai pembuat kebijakan bersama-sama dengan lembaga-lembaga lain yang dibentuk, juga sekaligus sebagai pelaksana kebijakan dan melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan. Agar pembangunan yang diharapkan dapat terwujud, maka pemerintah harus mampu menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dan mempunyai kesadaran yang cukup tinggi dalam rangka membangun daerahnya.

Hal-hal seperti inilah yang diharapkan oleh masyarakat pekebun kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, karena apabila pemerintah sudah mampu untuk memelopori masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir (khususnya pekebun kelapa) dengan hal-hal tersebut maka pengembangan perkebunan kelapa diyakini dapat terus meningkat dan nilai jual kelapa yang sebelumnya rendah karena dimonopoli oleh pihak swasta (PT. Pulau Sambu Group) dapat teratasi. Terkait dengan pemihakan selaku pemerintah selaku pelopor, setidaknya penulis merumuskan tiga indikator pemihakan selaku pelopor. *Pertama* pelopor pembentukan kebun unggul

(percontohan), *kedua* pelopor terbentuknya perkebunan multi fungsi, *ketiga* pelopor terbentuknya badan usaha.

5. Pemihakan Pemerintah Sebagai Aktor/Pelaksana Sendiri

Pemerintah sebagai instansi pelayanan publik diuntut untuk memperbaiki serta mengantisipasi perkembangan masyarakatnya dalam rangka meningkatkan kinerja dan kerja insatansi pemerintah serta menunjang terciptanya pemerintahan yang baik (good Governance). Untuk mewujudkannya maka diperlukan seorang pemimpin pemerintahan yang baik dan handal dengan cara meningkatkan produktifitas dan kinerja pemerintah itu sendiri.

Untuk terselenggaranya kinerja yang baik merupakan prasyarat utama yang diserukan oleh masyarakat kepada pemerintah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan pendidikan masyarakat. Sehingga tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bertanggung jawab, berdaya guna, berhasil guna, bersih, jelas nyata sesuai dengan fungsi dan perannya

Meskipun pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional memang merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta

melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah. Sebagaimana peran pemerintah tersebut sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri, pembangunan nasional harus diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi seluruh elemen pemerintah dengan ideal atau sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga terjadi keseimbangan dan gerak yang dinamis dalam roda pemerintahan yang baik.

Dalam hal ini seharusnya pemerintah juga mampu memainkan perannya, salah satu cara mungkin yang digunakan ialah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bidang penampungan kelapa. Pembentukan BUMD dalam bidang penampungan kelapa ini sebenarnya sudah lama direncanakan oleh pemerintah Indragiri Hilir, tetapi hingga kini belum juga terwujud. Ini disebabkan karena ketergantungan para pekebun kelapa kepada pihak swasta. Ketergantungan ini terjadi karena lamanya proses panen kelapa yang berkisar 8-10 minggu, sehingga untuk memenuhi kehidupan sehari-hari para pekebun tersebut mau tidak mau harus meminjam uang kepada tokeh/tengkulak (pihak swasta) untuk memenuhi kehidupan mereka dan nantinya akan dibayar dengan hasil panen mereka. Dalam kaitan dengan pemihakan pemerintah selaku pelaksana kebijakan dalam peningkatan produktifitas perkelapaan di INHIL dalam kondisi rill belum menunjukkan upaya nyata. Kerja-kerja pemerintah dalam bentuk kebijakan, anggaran maupun pembangunan belum menunjukkan hasil yang nyata bagi petani kelapa di INHIL.

Selaku aktor, sejatinya banyak hal yang dapat dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir guna meningkatkan taraf hidup petani kelapa di Inhil maupun dalam peningkatan produktifitas perkebunan serta pengembangan usaha perkebunan. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya mampu memainkan peran selaku aktor kebijakan, aktor pasar dan aktor pelaku pertanian.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemihakan Terhadap Petani Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir

Sebagaimana penjabaran teoritik pada bab sebelumnya maka pisau analisis yang digunakan untuk melihat dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemihakan pemerintah terhadap petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir adalah berdasarkan pendapat George Edward III sebagaimana sudah dituliskan di atas.

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu upaya yang diterapkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan komunikasi dalam pemihakan pemerintah terhadap petani kelapa merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam upaya perbaikan nasib petani kelapa dan peningkatan kapasitas produksi. Dalam hal ini adalah komunikasi antara pemerintah-swasta dan masyarakat.

Dalam ruang lingkup organisasi, informasi tidak berkembang secara harfiah. Kenyataannya informasi sendiri tidak bergerak, hal yang sesungguhnya terlihat adalah cara penyampaian suatu pesan, interpretasi penyampaian tersebut dan penciptaan penyampaian lainnya. Jadi yang kita namakan aliran informasi dalam organisasi

sebenarnya adalah suatu proses dinamik, dalam proses inilah pesan-pesan secara tetap dan berkesinambungan diciptakan, ditampilkan dan diinterpretasikan. Proses ini berlangsung terus berubah secara konstan berbentuk komunikasi.

Menyoal pemihakan pemerintah dalam peningkatan produktifitas perkebunan kelapa dan perbaikan nasib petani kelapa, peranan komunikasi yang dimainkan oleh pemerintah menjadi hal yang sangat penting. Namun, kegiatan komunikasi hanya berjalan searah dari pemerintah. Hal berikutnya yang menyangkut masalah komunikasi adalah bentuk komunikasi yang digunakan dalam melihat pemihakan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Menurut Uchjana (1999) komunikasi yang tercipta dalam organisasi yakni antara pimpinan dengan bawahan terbagi atas tiga kegiatan yaitu:

a. Komunikasi vertikal yakni komunikasi dari atas kebawah yakni komunikasi dari pimpinan kebawah dan dari bawahan kepimpinan. Komunikasi ini sangat penting sekali karena terjadi secara timbal balik sehingga pimpinan dapat mengetahui laporan, tanggapan, gagasan, atau saran dari pegawai bawahan sebagai petunjuk efektif atau tidaknya kebijaksanaan yang dijalankan.

b. Komunikasi horizontal adalah komunikasi secara mendatar yakni antara sesama anggota staf atau pegawai, pegawai tingkat menengah dengan tingkat menengah atau pegawai rendahan dengan pegawai rendahan pula.

c. Komunikasi diagonal yakni komunikasi dalam organisasi antara

seseorang dengan orang lain yang berbeda kedudukan dan bagian yang dipegang.

Sedangkan bentuk komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya peningkatan kapasitas produksi perkebunan kelapa dan peningkatan kesejahteraan petani kelapa.

Komunikasi diterapkan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi kepada berbagai pihak mengenai suatu hal. Dalam hal ini komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Dinas Perkebunan sebagai unit analisis penelitian adalah mengenai program-program yang telah disusun oleh Pemerintah.

2. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan penentu keberhasilan suatu instansi dan mempunyai peran untuk mewujudkan tujuan instansi, serta sebagai unsur penggerak suatu instansi, yang dalam pelaksanaannya sering menimbulkan masalah. Hal ini dapat terjadi karena setiap manusia mempunyai karakteristik yang berbeda dan latar belakang sosial berbeda pula.

Salah satu masalah yang sering dihadapi instansi yaitu masalah kemampuan dan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu seorang pimpinan sebagai pihak yang bertanggung jawab, harus mampu meningkatkan kemampuan kerja bawahannya dan harus mampu mengetahui serta memenuhi harapan, keinginan dan kebutuhan. Dinas Perkebunan termasuk salah satu dinas yang memiliki tugas penting dalam kegiatan peningkatan produktifitas dan peningkatan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Seharusnya jumlah pegawai yang berkompeten dapat mencukupi kebutuhan dinas sehingga dalam penyusunan rencana kegiatan dan melaksanakan rencana dapat berjalan dengan baik. Jumlah sumber daya dan kemampuan pegawai yang telah tersedia diharapkan dapat mencukupi kebutuhan untuk melakukan tugas di lapangan, tetapi kenyataannya kompetensi pegawai tersebut belum memadai.

3. Faktor Disposisi

Disposisi adalah hal yang menyangkut sikap dan komitmen para pelaksana terhadap program khususnya bagi mereka yang menjadi implementor program, implementor disini dimaksudkan yaitu para birokrat. Disposisi pelaksanaan diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan.

Kinerja seorang pegawai akan dipengaruhi oleh bagaimana sikapnya dalam bekerja, salah satunya dapat dilihat dari kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Dalam menjalankan tugas seorang pegawai dibutuhkan kedisiplinan, karena dengan disiplin yang tinggi, ia dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Pengertian disiplin menurut Hasibuan (2010:193) adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, ia akan mematuhi/mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. Kesediaan adalah suatu sikap, tingkat laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan

peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak.

Komitmen kerja dari pegawai menjadi faktor penting dan bisa jadi yang paling menentukan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan sebab tanpa adanya komitmen kerja yang tinggi mengakibatkan beban tugas yang dilaksanakan menjadi tidak menentu dan inilah yang terjadi dalam pembangunan perkelapaan di Kabupaten INHIL.

Faktor Struktur Birokrasi

Dukungan struktur birokrasi juga merupakan salah satu upaya mewujudkan pelaksanaan kebijakan yang baik. Dukungan struktur birokrasi ini meliputi kepemimpinan dan lingkungan kerja. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi penting sekali artinya, karena kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja aparatur pegawai pemerintah. Kepemimpinan yang tepat dan sesuai dengan kondisi organisasi, dapat mendukung terwujudnya kinerja pegawai yang baik demikian pula sebaliknya. dalam suatu organisasi kerja, keberhasilan kerja tidak sekedar tergantung pada pegawai yang bertugas secara operasional dalam usaha menghasilkan sesuatu. Dalam hal ini sangat penting peran para pimpinan sebagai pihak yang berwenang menetapkan kebijakan, peraturan termasuk dalam mendorong dan membantu dalam meningkatkan kinerja.

Selain kepemimpinan, lingkungan kerja juga amat berperan dalam mewujudkan kinerja yang baik. Lingkungan kerja meliputi lingkungan kerja fisik seperti kondisi bangunan, sarana dan prasarana, fasilitas kerja dan lain-lain. Sedangkan lingkungan kerja non fisik adalah hubungan kerja atasan

dengan bawahan, hubungan kerja antar sesama bawahan dan adanya koordinasi kerja baik.

Peranan seorang pemimpin, selain sebagai perintis, pemimpin juga harus mengemban tiga fungsi lainnya, yakni sebagai penyeleras, pemberdaya dan panutan. Sebagai penyeleras, pemimpin harus mampu menyelaraskan seluruh bagian atau fungsi dalam organisasi agar bekerja dalam satu sistem. Sebagai pemberdaya, pemimpin berfungsi memberdayakan setiap orang dalam organisasi agar mampu berkarya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah disepakati bersama. Sementara sebagai panutan, sikap, tutur kata dan perilaku pemimpin harus bisa dijadikan panutan bagi seluruh karyawan. Tohardi (2002) juga menyatakan bahwa sebuah organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan (tujuan) apabila dikemukakan oleh seorang pemimpin yang mampu melakukan peranan dengan maksimal yaitu interpersonal role (yaitu peran pimpinan sebagai orang yang ditokohkan), informational role (yaitu peran pimpinan untuk mampu berbicara dengan baik dan mempunyai banyak informasi) dan peranan ketiga yaitu decision making (peran sebagai pengambil keputusan).

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa selain kepemimpinan maka masalah lingkungan kerja juga perlu mendapat perhatian, lingkungan kerja yang baik akan menumbuhkan gairah kerja pegawai, sehingga tercipta kinerja yang tinggi dan produktivitas kerja karyawan yang meningkat. Sementara jika lingkungan kerja kurang baik seperti sering terjadi konflik antara atasan

dengan bawahan maka kinerja bawahan juga akan menurun karena pada dasarnya kondisi lingkungan kerja yang tidak menyenangkan akan menurunkan aktivitas kerja karyawan sehingga efektifitas dan efisiensi kerja akan menurun.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pemihakan pemerintah terhadap petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir belum menunjukkan komitmen serius dari segi pemerintah yang seharusnya bertindak selaku stabilisator, inovator, modernisator, pelopor maupun pemerintah selaku pelaksana kebijakan pemerintah itu sendiri. Kondisi riil seperti infrastruktur dalam rangka penguatan basis distribusi hasil perkebunan, kondisi anggaran maupun program kerja belum menunjukkan kesungguhan pemerintah memihak pada nasib petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam menjaga stabilitas harga kelapa, pemerintah terkesan tidak bertindak apapun sehingga harga kelapa mutlak ditentukan oleh pasar (permintaan dan penawaran).

2. Bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi pemihakan pemerintah kepada petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Faktor tersebut yaitu pertama faktor komunikasi antara pemerintah-swasta dan masyarakat selaku subjek dan objek kebijakan pengembangan perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir. Kedua adalah faktor sumber daya, yang dimaksud sumber daya dalam konteks ini adalah sumber daya

manusia. Minimnya sumber daya manusia dalam penyusunan perencanaan kerja dan pelaksanaan kerja yang baik menyebabkan banyak program strategis pemerintah yang tidak berjalan demikian halnya dalam program pengembangan perkelapaan di Kabupaten INHIL. Ketiga faktor disposisi yakni sikap dan komitmen pemerintah selaku penginisiasian program dan pemegang kuasa anggaran dalam pembangunan sektor perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini sikap pemerintah belum menunjukkan pemihakan yang serius dan komitmen rendah pemerintah terhadap petani kelapa. Keempat adalah faktor struktur birokrasi, yakni birokrasi pemerintah yang belum mampu menjadi jembatan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah serta pihak swasta dalam hal pengembangan sektor perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan tersebut, penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut;

1. Pemerintah hendaknya menyusun perencanaan strategis pengembangan sektor perkebunan kelapa sehingga secara keseluruhan mulai dari hulu hingga hilir, kelapa masyarakat mendapatkan tempat di pasar baik skala kecil maupun skala luas.
2. Diperlukan komitmen pemerintah dalam penganggaran pembangunan infrastruktur sehingga distribusi produk perkebunan kelapa dapat berjalan dengan lancar.
3. Diperlukan BUMD yang bergerak di bidang pengembangan

sektor perkelapaan sehingga masyarakat memiliki alternatif pemasaran produk perkebunan kelapa.

4. Diperlukan pendampingan dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produk perkebunan kelapa dan hilirisasi produk perkebunan kelapa baik oleh Industri Kecil Rumah Tangga maupun oleh swasta.

5. Diperlukan struktur birokrasi, administrasi dan fiskal yang kuat sehingga secara teknis administrasi petani lebih mudah dalam pengurusan berbagai macam hal terkait dengan pengembangan perkebunan kelapa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, 2003, Metodologi Penelitian Kualitatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Manulang, 2004, Pedoman Teknis Menulis Skripsi, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : Andi
- Miftah Thoha. 2010. Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers
- Nunuy Nur Afiah. 2009. Akuntansi Pemerintahan : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Jakarta : Kencana
- Nurudin, Rachmad K Dwi Susilo, Tri Sulistyarningsih. 2006. Kebijakan Elitis Politik Indonesia, Yogyakarta : Celeban Timur
- Pheni Chalid. 2005. Keuangan Daerah Investasi, dan Desentralisasi, Jakarta : Kemitraan
- Ramlan Subakti. 1992. Memahami Ilmu Politik, Jakarta : PT Grasindo
- Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta : Elekmedia Komputindo
- Solichin Abdul Wahab. 2001. Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiono, 2007, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung
- Sukandar rumidi, 2004, Metodologi Penelitian, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijakan Publik. Sinar Grafika : Jakarta.
- Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Grasindo : Jakarta.
- Wiliam, N, Dunn. 1994. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Sumber lain

- <http://berita.inhil.com/-sekilas-indragiri-hilir>
- <http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>
- <http://www.com/artikel-pengembangan-perkebunan-kelapa.html>
- Pos Metro Indragiri
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49, tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Daerah Kabupaten Tingkat II
- Undang- undang No. 12 tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang- undang No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan